

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
TERHADAP BELANJA LANGSUNG  
( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Di Provinsi Jawa Tengah )**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**TRY INDRANINGRUM**  
**NIM. C2C607146**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

**2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Try Indraningrum

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607146

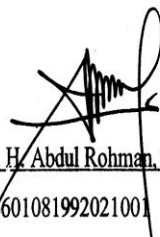
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH)**

Dosen pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt

Semarang, Oktober 2011

Dosen Pembimbing,

  
(Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt)  
NIP. 196601081992021001



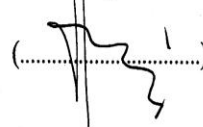
## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Try Indraningrum  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607146  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)  
TERHADAP BELANJA LANGSUNG (STUDI  
PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA  
TENGAH)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 03 November 2011**

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt
2. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt
3. Hj. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt

()  
()  
()

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, TRY INDRANINGRUM, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Oktober 2011

Yang membuat pernyataan,

(Try Indraningrum)

NIM : C2C607146

## **ABSTRACT**

*From 33 provinces and 471 districts/cities in Indonesia, only about 10 percent which have an official demarcation of the territory, one of them is Central Java province which has 35 districts/cities. Central Java province has large of amount natural resources. Therefore, this study aims to prove empirically the influence of Revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU) to Direct Expenditure In Regency/City in Central Java. The object of this study is 35 regencies/municipalities in Central Java Province. The data used in this study are the data taken in 2007 until 2009.*

*The data analyzed in this study is secondary data sourced from the Actual Budget Report document Regency/City in the province of Central Java are obtained from Local Government Revenue Sharing Sites on the Internet ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Realization of the budget report was obtained data on the number of Direct Expenditure realization, revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU). Sampling method using census method by taking the entire population. From these data, then analyzed using multiple linear regression techniques with the help of SPSS 16.*

*The results of this study indicate that the revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) has a positive and significant influence on increasing of Direct Expenditure. This means that local government can predict the Direct Expenditure budget based on revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU).*

*Key words: Local Own Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), Direct Expenditure, Budget Realization Report.*

## **ABSTRAK**

Dari 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 10 persen yang mempunyai penetapan batas wilayah yang resmi salah satunya provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/kota. Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan dan kekayaan alam yang melimpah di setiap daerahnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Objek dari penelitian ini adalah 35 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data yang diambil pada tahun 2007 sampai 2009.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Situs Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Hal tersebut berarti Pemerintah Daerah dapat memprediksi anggaran Belanja Langsung didasarkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Langsung, Laporan Realisasi APBD.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu ditunggu syafa'atnya di yaumul akhir. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah untuk semua anugerah yang telah diberikan kepada penulis sehingga atas izin dan kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG ( STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH )**”, Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, petunjuk dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan dedikasi dan pengabdian kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, banyak memberi nasehat, bimbingan, arahan dan masukan – masukan selama pengerjaan skripsi dan selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan suri tauladan yang bermanfaat. Seluruh staff akademisi, staf tata usaha dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah membesarkan dan merawat penulis serta memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, bimbingan, pengorbanan, kesabaran dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5. Kakak-kakakku dan keponakanku tersayang, atas semua kasih sayang, kesabaran, perhatian, motivasi, doa dan pengorbanannya.
6. Keluarga di Semarang, atas dukungan dan bantuannya baik materiil maupun spiritual.
7. Seluruh keluarga besarku, atas segala doa, perhatian, kasih sayang dan nasehat-nasehatnya.
8. Semua teman-teman dan sahabat-sahabat terbaikku, atas motivasi, inspirasi, kebersamaan dan canda tawa kalian.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.



Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberikan motivasi, inspirasi, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Penulis telah berusaha melakukan yang terbaik dalam penyusunan Skripsi ini, namun tentunya penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak dalam rangka perbaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, Oktober 2011

Penulis

Try Indraningrum

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Bila Allah memberikan cobaan, maka hadapi dengan senyum keikhlasan dan patutlah berbangga kita yang telah dipilihNya sebab di balik itu semua, Allah pasti mempunyai rencana dan maksud lain yang jauh lebih baik.....*
- ❖ *Saat satu pintu kebahagiaan tertutup, yakinlah bahwa Allah pasti akan membukakan pintu-pintu kebahagiaan lainnya.....*

### **PERSEMBAHAN :**

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk :

- *Bapak dan ibuku tercinta yang sangat aku kagumi,*
- *Kakak-kakakku dan keponakanku yang sangat aku sayangi,*
- *Seluruh keluarga besarku yang sangat aku sayangi,*
- *Keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip*
- *Dan, seseorang yang telah membuatku bermetamorfosis menjadi pribadi yang lebih baik, memberiku semangat dan kekuatan dengan segala kebaikan, kesabaran, kejujuran dan kesungguhannya.....*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1 Otonomi Daerah .....	10
2.1.2 Anggaran Daerah sektor publik.....	12
2.1.2.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	13
2.1.2.2 Kriteria Anggaran.....	15
2.1.2.3 Fungsi Anggaran .....	16
2.1.2.4 Klasifikasi Anggaran .....	19
2.1.2.5 Jenis Anggaran .....	20
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.1.4 Dana Perimbangan.....	24
2.1.5 Dana Alokasi Umum .....	27
2.1.6 Belanja Daerah .....	31
2.1.6.1 Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP No. 24/2005 .....	32
2.1.6.2 Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP No. 58 /2005 .....	36
2.1.7 Belanja Langsung .....	38
2.2. Penelitian Terdahulu .....	39
2.3. Kerangka Pemikiran .....	44
2.4. Hipotesis Penelitian.....	46
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	

terhadap Belanja Langsung .....	46
2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum	
terhadap Belanja Langsung .....	49
BAB III METODE PENELITIAN .....	51
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	51
3.1.1 Variabel Penelitian .....	51
3.1.1.1 Variabel Bebas (Independen) .....	51
3.1.1.2 Variabel Terikat (Dependen) .....	51
3.1.2 Definisi operasional .....	52
3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	52
3.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) .....	52
3.1.2.3 Belanja Langsung .....	53
1.2 Populasi dan Sampel .....	54
1.3 Jenis dan Sumber Data .....	54
1.4 Metode Pengumpulan Data .....	55
1.5 Metode Analisis .....	55
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	55
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	56
3.5.2.1 Uji Normalitas .....	56
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas .....	57
3.5.2.3 Uji Autokorelasi .....	58
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	59
3.5.3 Model Regresi .....	60
3.5.4 Uji Hipotesis .....	60

3.5.4.1 Koefisien determinasi .....	61
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	61
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	61
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	63
4.2. Statistik Deskriptif .....	65
4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	68
4.3.1 Hasil Uji Normalitas .....	68
4.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas .....	71
4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi .....	72
4.3.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	74
4.4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	76
4.4.1 Koefisien Determinasi .....	76
4.4.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	77
4.4.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	78
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis .....	80
4.6 Pembahasan Hipotesis .....	82
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung .....	82
4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung .....	83

BAB V PENUTUP .....	84
5.1. Kesimpulan .....	84
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	84
5.3. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1	Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi .....	59
Tabel 4.1	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ..	64
Tabel 4.2	Hasil Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.3	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....	70
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinieritas .....	72
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi – Uji Durbin Watson.....	73
Tabel 4.6	Durbin Watson Test.....	73
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi – Hasil Uji Autokorelasi .....	76
Tabel 4.8	Hasil Uji F .....	77
Tabel 4.9	Hasil Uji T.....	78
Tabel 4.9	Hasil Uji T.....	80
Tabel 4.10	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....	81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.1	Normal Probability-Plot .....	70
Gambar 4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas - Scatterplot.....	75

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kabupaten/Kota Sampel.....	90
Lampiran 2 Laporan Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Langsung Tahun 2007..	91
Lampiran 3 Laporan Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Langsung Tahun 2008..	92
Lampiran 4 Laporan Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Langsung Tahun 2009..	93
Lampiran 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	94
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas .....	95
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinieritas .....	99
Lampiran 8 Hasil Uji Autokorelasi .....	101
Lampiran 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002).

Subagyo (2003) menyatakan bahwa keputusan politik pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Pelaksanaan otonomi daerah didukung adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Lahirnya undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat

“given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosiokultural masyarakat setempat. Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintahan kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk berkreasi, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten dan kota menunjukkan kemampuannya. Ini merupakan tantangan bahwa daerah mampu mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal yang patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh (Pratiwi, 2007).

Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat. Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006).

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan

APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan (Puspita Sari, 2010).

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan konstribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi

Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Kawedar, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana untuk membiayai tugas dan

kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi. Badan Pusat Statistik (2009) menyatakan bahwa realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2008 terhimpun sekitar 4,5 triliun rupiah, naik sekitar 0,35 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kondisi kabupaten dan kota di Jawa Tengah secara umum berpotensi untuk lebih maju dibandingkan dengan daerah lain dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah kabupaten dan kota.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Puspita Sari (2010) yaitu “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau” dengan periode penelitian dari tahun 2005-2008 sedangkan peneliti sekarang meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” dengan menggunakan periode penelitian dari tahun 2007-2009.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung, Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”.

## **1.2 Rumusan Masalah**



Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini antara lain :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja langsung.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan

dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja langsung.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah Program Sarjana (S1) Ekonomi Universitas Diponegoro. Skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terkait satu sama lain. Adapun mengenai sistematika penulisan dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, yang menyajikan latar belakang penelitian sehingga timbul suatu permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, yang memuat landasan teori yang berkaitan dengan obyek dari apa yang akan diteliti oleh peneliti.

**BAB III METODE PENELITIAN**, yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, yang berisi tentang hasil penelitian dan menguraikan tentang obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Halim, 2001).

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Halim, 2001).

Menurut Shah (dalam Mardiasmo, 2004) secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Halim (2001) mengemukakan bahwa tujuan otonomi dibedakan menjadi dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi kepentingan pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.

2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

### **2.1.2 Anggaran Daerah sektor publik**

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan hasil perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2004). Tahap penganggaran menjadi sangat penting

karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Menurut Mardiasmo (2004) secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja).
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

#### **2.1.2.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran serta menggambarkan juga perkiraan penerimaan tertentu dan sumber-sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2006).

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2005 dalam Kawedar, dkk 2008) sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proporsional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan



manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) (Pratiwi, 2007).

#### **2.1.2.2 Kriteria Anggaran**

Menurut Bastian (2001) Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan provinsi seharusnya dapat memenuhi kriteria berikut :

1. Anggaran harus dapat merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Anggaran harus dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah karena beberapa alasan sebagai berikut (Bastian, 2001) :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

#### **2.1.2.3 Fungsi Anggaran**

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat perencanaan (*planning tool*)

Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang akan dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,

- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Sebagai alat pengendalian (*controlling tool*)

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu :

- a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,
- b. Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*),
- c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians,
- d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakn fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui

anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakn fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Sebagai alat politik (*political tool*)

Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

5. Sebagai alat koordinasi dan komuniksai (*coordination and communication tool*)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*)

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pencapaian anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah

ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Sebagai alat pemotivasi (*motivation tool*)

Sebagai alat pemotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisiensi dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*)

Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran sektor publik merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

#### **2.1.2.4 Klasifikasi Anggaran**

Klasifikasi APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri dari 3 bagian, yaitu “pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.”

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok piutang, dan pemberian pinjaman daerah (Permendagri 13/2006).

#### **2.1.2.5 Jenis Anggaran**

Jenis anggaran sektor publik menurut Bastian (2001) dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran operasional

Anggaran operasional yaitu anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah pusat/daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Belanja operasi merupakan bagian dari anggaran operasional. Belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya hanya untuk satu periode anggaran dan tidak dimaksudkan untuk menambah aset pemerintah. Klasifikasi belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja operasional.

2. Anggaran modal/investasi

Anggaran modal/investasi merupakan anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan dan perabot kantor. Belanja modal merupakan bagian dari anggaran modal/investasi. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan untuk investasi permanen, aset tetap dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja modal meliputi belanja perolehan investasi permanen dan belanja pembelian aset tetap.

### **2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Isdijoso, 2002). Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan

untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Isdijoso (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu ( UU No. 32/2004) :

1. Hasil pajak daerah;

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif (UU No. 28/2009).

Menurut UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



## 2. Hasil retribusi daerah;

Menurut UU No. 28/2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup (UU No. 33/2004) :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

#### **2.1.4. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, deferensial potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa

disebut *fiscal gap* (celah fiskal). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Menurut (Halim, 2002) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” dijelaskan bahwa Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Pemerintah pusat dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari :

- a. Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

- b. Sumber Daya Alam, seperti : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
- 2. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Isdijoso, 2002), sedangkan menurut Widjaja (2002:129), “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat baik.” Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dan dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25/1999 dalam Mardiasmo (2004 : 97), dana perimbangan dari pemerintah pusat terdiri dari bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, DAU dan DAK. Dari ketiga alokasi dana tersebut DAU merupakan alokasi terbesar. Klasifikasi dana perimbangan berdasarkan Permendagri 13/2006, terdiri atas :

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **2.1.5. Dana Alokasi Umum**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002).

Mengacu PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan DAU terutama adalah untuk: (a) *horizontal equity* dan (b) *sufficiency*.

Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) (Mardiasmo, 2002).

Pratiwi (2007) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah, yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*);
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*);
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Pada dasarnya terdapat dua jenis *grant* yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu: (1) *block grant* (Dana Alokasi Umum), dan (2) *specific grant* (Dana Alokasi Khusus). Dalam rangka meningkatkan *local discretion*, *grant* yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grant*, bukan *specific grant*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (2001) bahwa penghitungan DAU didasarkan pada dua faktor, yaitu: (1) faktor murni, dan (2) faktor penyeimbang. Faktor murni adalah penghitungan DAU berdasarkan formula. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Dimasukkannya faktor penyeimbang dalam penghitungan DAU adalah karena adanya kelemahan dalam faktor murni. Perhitungan DAU dengan menggunakan formula murni menunjukkan bahwa banyak daerah yang mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah mengalami lonjakan penerimaan yang luar biasa.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sedangkan menurut PP No. 53 Tahun 2009 tentang *Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010* bahwa Dana alokasi Umum adalah Dana Alokasi Umum Murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.
- b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah* bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.



#### **2.1.6. Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan dan rasional. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemda (pemerintah daerah) yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Makna pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali atas pengeluaran belanja yang telah terjadi, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya (Sembiring, 2010).

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, anggaran belanja daerah, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan jenis dana yang didaerahkan, maupun dari besaran alokasi dana yang didaerahkan.

#### **2.1.6.1. Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP No. 24/2005**

Berdasarkan SAP (PP No. 24/2005), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **1. Klasifikasi Ekonomi**

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi kelompok belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Masing-masing kelompok belanja tersebut dirinci menurut jenisnya. Belanja daerah menurut jenisnya disusun sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian jenisnya, belanja operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Dengan demikian, jenis-jenis belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenisnya) terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah;
- f. Belanja bantuan keuangan/sosial;
- g. Belanja bagi hasil;
- h. Belanja modal; dan
- i. Belanja lain-lain/tidak terduga

Penjelasan dari masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan

kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil.

- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja barang, jasa, ongkos kantor, perjalanan dinas dan pemeliharaan.
- c. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga hutang/pinjaman daerah baik yang bersifat pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang.
- d. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga yang sah untuk mendukung kemampuan daya beli masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Pihak-pihak tertentu seperti kepada: pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah daerah di luar wilayah provinsi, atau hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota dalam wilayah provinsi atau dari provinsi, kabupaten/kota kepada perusahaan daerah/BUMD, perusahaan negara/BUMN dan masyarakat.
- f. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagihasilkan

kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- g. Belanja bantuan keuangan/sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, badan/lembaga/organisasi sosial kemasyarakatan, partai politik dan organisasi profesi. Belanja bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kepada pemerintah desa atau bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemerintah desa dapat dikelompokkan ke dalam bantuan bersifat umum (*block grant*) atau bantuan bersifat khusus (*specific grant*). Bantuan keuangan bersifat umum merupakan bantuan yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Bantuan keuangan bersifat khusus merupakan bantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota/pemerintahan desa tertentu yang pedoman penggunaannya dapat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan prioritas provinsi/kabupaten/kota atau sesuai dengan usulan kabupaten/kota/pemerintahan desa yang membutuhkan.
- h. Belanja tidak terduga, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran guna penanganan bencana alam, bencana sosial atau penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang sangat mendesak diperlukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang dananya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

## 2. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan satuan kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah (Sekda) pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

## 3. Klasifikasi Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

### **2.1.6.2. Klasifikasi Belanja Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005**

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.

1. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
  1. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan  
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.
  2. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara  
Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
    - a. Pelayanan umum
    - b. Ketertiban dan keamanan
    - c. Ekonomi
    - d. Lingkungan hidup
    - e. Perumahan dan fasilitas umum
    - f. Kesehatan
    - g. Pariwisata dan budaya
    - h. Pendidikan
    - i. Perlindungan sosial.
3. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:
  1. Belanja pegawai
  2. Belanja barang, dibagi atas:

- a. Belanja pengadaan barang dan jasa
  - b. Belanja pemeliharaan
  - c. Belanja perjalanan
- 3. Belanja modal
  - 4. Bunga
  - 5. Subsidi
  - 6. Hibah
  - 7. Bantuan sosial
  - 8. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
  - 9. Belanja tidak terduga

#### **2.1.7. Belanja Langsung**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

##### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.



## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

## 3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

### 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya seperti Abdullah & Halim (2004) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah.

Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa secara empiris membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Penelitian ini dilakukan di DIY dan Jawa Tengah.

Abdullah & Halim (2004) menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan dan Bantuan Pemerintah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sementara PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Maimunah (2006) menguji *flypaper effect* pada dana alokasi umum(DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada (1) pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (2) kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (3) kecenderungan *flypaper effect* menyebabkan peningkatan jumlah Belanja Daerah; (4) kemungkinan adanya perbedaan *flypaper effect* antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang PADnya tinggi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang PADnya rendah; dan terakhir (5) pengaruh DAU dan PAD pada kategori pengeluaran sektor yang berhubungan langsung dengan publik (belanja bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum).

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada lima simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Ketiga, terdapat pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi Belanja Daerah periode ke depan. Keempat, tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PADnya rendah maupun tinggi di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Kelima, tidak terjadi *flypaper effect* pada Belanja daerah bidang

Pendidikan, tetapi telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah bidang Kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum.

Darwanto (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sedangkan secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh.

Puspita Sari (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2004)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.	-Dana Alokasi Umum (DAU) -Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Belanja Daerah	PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

2	Kesit Bambang Prakosa (2004)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiris di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY).	-Dana Alokasi Umum (DAU) -Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Belanja Daerah	Besarnya belanja daerah di pengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD.
3	Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2004)	Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya terhadap Belanja Pemeliharaan	-Belanja Modal -Bantuan Pemerintah -PAD	Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan dan Bantuan Pemerintah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sementara PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4	Mutiara Maimunah (2006)	Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.	-Dana Alokasi Umum (DAU) -Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Belanja Daerah	Pengaruh <i>flypaper effect</i> dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah periode ke depan, dan tidak terdapat perbedaan terjadinya <i>flypaper</i> pada PAD yang tinggi maupun yang rendah.

5	Darwanto (2007)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja.	-Pertumbuhan Ekonomi -PAD -DAU -Anggaran Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh.
6	Noni Puspita Sari (2010)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.	-Dana Alokasi Umum (DAU) -Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Belanja Langsung	-Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. -Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. -Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Sumber: Data sekunder diolah, 2011

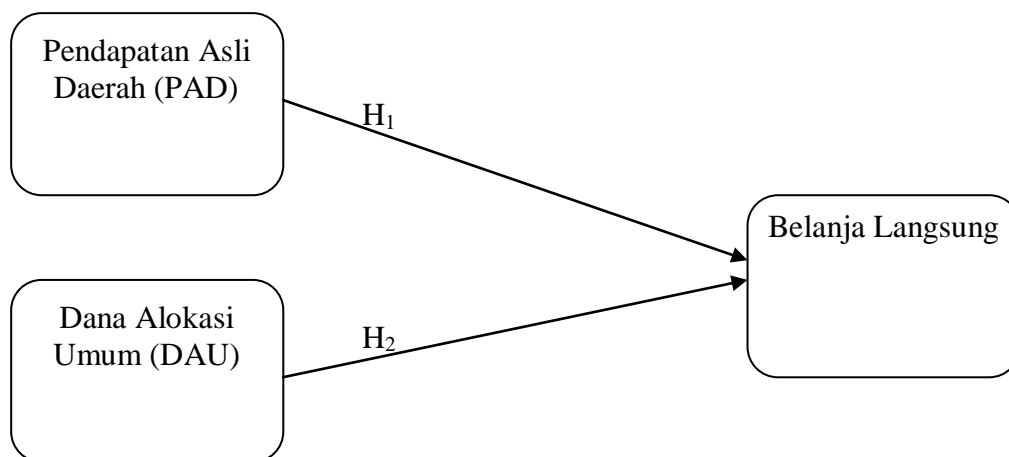
## 2.3 Kerangka Pemikiran

Dari uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.

**Gambar 2.1**

### Model Kerangka Pemikiran

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah**



Dalam APBD terkandung unsur pendapatan dan belanja, dimana pendapatan yang dimaksud adalah sumber-sumber penerimaan untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan belanja adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. DAU (Dana Alokasi Umum) adalah dana yang berasal dari

APBN, yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Besar-kecilnya transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang termasuk dalam bagian Dana Perimbangan mempengaruhi alokasi belanja langsung. Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan di masa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah. Hal ini diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang No. 33 tahun 2004 diterangkan untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbangan) untuk itu diharapkan DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung**

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), Abdullah & Halim (2004) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan mempegaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hyphotesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.



Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Colombatto (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. Menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Puspita Sari, 2010).

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi (Indah Rahmawati, 2010). Sihite (2009) juga mengemukakan bahwa secara parsial dana bagi hasil (DBH), dana

alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD), masing-masing berpengaruh signifikan positif terhadap belanja langsung. Sedangkan secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Melihat beberapa hasil penelitian di atas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung**

Maimunah (2006) menguji *flypaper effect* pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif).

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Puspita Sari, 2010).

Darwanto (2007), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik ditegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka

pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Puspita Sari (2010) mengemukakan bahwa dana alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Sekaran, 2002 : 30). Pengujian ini untuk menganalisis secara empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja langsung.

##### **3.1.1.1 Variabel Bebas (Independen)**

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa disebut variabel independen karena variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel *antiseden* (sebelumnya). Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah (1) pendapatan asli daerah (PAD), (2) dana alokasi umum (DAU).

##### **3.1.1.2 Variabel Terikat (Dependen)**

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa disebut variabel dependen karena variabel ini dipengaruhi variabel sebelumnya. Variabel-variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja langsung.

### **3.1.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sekaran, 2006).

#### **3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai tahun 2008. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

#### **3.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil (Indah Rahmawati, 2010).

Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diukur dengan jumlah Rupiah (Rp) yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran. Dana Alokasi Umum dalam penelitian

ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai tahun 2008. Menurut Suparmoko (2002) rumus perhitungan DAU untuk kabupaten/kota atas dasar alokasi adalah, sebagai berikut:

$$DAU = ( \% \times \text{bobot} ) \times ( DAU \text{ kabupaten/kota} )$$

### **3.1.2.3 Belanja Langsung**

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri 13/2006). Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja Langsung dalam penelitian ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai tahun 2009.

$$BL = BP + BBJ + BM$$

Dimana :

BL : Belanja Langsung

BP : Belanja Pegawai

BBJ : Belanja Barang dan Jasa

BM : Belanja Modal

## **3.2 Populasi dan Sampel.**

Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, atau ukuran ketertarikan dari hal menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 1996). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota pada Tahun 2007 sampai 2009 dengan alasan ketersediaan data.

Sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 1996). Dalam penelitian ini, sampelnya adalah populasi tersebut, jadi populasi ini merupakan sampel penelitian. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus



dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

### **3.5 Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 2002). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006).

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak

mengandung multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari:

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histrogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

#### **3.5.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel bebas (independen) harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama

dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006).

### 3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Santoso, 2000). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Santoso (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test)

**Tabel 3.1**  
**Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi**

Hipotesis Nol (0)	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No Decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Imam Ghozali, 2006

### 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

### 3.5.3 Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Data diolah dengan bantuan *software* SPSS seri 16.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 2002). Persamaan regresi adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e_1$$

Dimana:

Y = Belanja Langsung

$\alpha$  = *Intercept* persamaan Regresi

X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum (DAU)

b = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

e = koefisien eror

### **3.5.4 Uji Hipotesis**

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2006).

#### **3.5.4.1 Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R Square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### **3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

#### **3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila  $p\text{-value} < 5\%$  (Ghozali, 2006).